

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN MAJENE**

**(Studi Kasus Masyarakat Pesisir Desa Balombang  
Kec. Pamboang)**

**IMPLEMENTATION OF COASTAL COMMUNITY  
EMPOWERMENT PROGRAMS IN DISTRICT OF MAJENE**

**(Case Study of Balombang Village Coastal Community  
Sub-District Pamboang)**



**TESIS**

Oleh :

**ASWAD AMIR**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105.03.12.018.16**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN MAJENE**

**(Studi Kasus Masyarakat Pesisir Desa Balombong  
Kec. Pamboang)**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

**ASWAD AMIR**

Nomor Induk Mahasiswa : 105.03.12.018.16

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN MAJENE (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Desa Balombang Kec. Pamboang)

Nama Mahasiswa : **ASWAD AMIR**

Nim : 105.03.12.018.16

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Setelah diperiksa dan diteliti, tesis ini sudah memenuhi persyaratan dan layak untuk diseminarkan pada seminar hasil penelitian.



Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.**

**Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si.**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana  
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik

**Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag.**  
NBM. 483 523

**Dr. Hj. Fatmawati, M.Si.**  
NBM. 1076424

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Aswad Amir

NIM : 105.03.12.018.16

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 08 Oktober 2018

Aswad Amir

## ABSTRAK

**Aswad Amir, 2018.** Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Majene, dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Anwar Parawangi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Penelitian dilaksanakan di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki beberapa perspektif teori dengan tipe studi kasus.

Penelitian menunjukkan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Desa Balombong dilakukan dengan sosialisasi secara *top-down* terkait program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene termasuk Desa Balombong. Selain itu, pada sumber daya, pemerintah daerah dan pemerintah desa konsisten dalam mengimplemetasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene. disposisi dengan baik yang ditandai dengan pemberian upah (insentif) bagi aparatur yang akan mengimplementasikan kebijakan / program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong. Selain itu, aparatur dibekali pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir karena sudah diberikan pendidikan, pelatihan sebelumnya sebelum berinteraksi dengan masyarakat pesisir, dan terakhir adalah indikator sistem / struktur birokrasi, sistem birokrasi secara umum masih terdapat beberapa kelemahan seperti tumpang tindih kewenangan terkait urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir.

*Kata Kunci : implementasi, program, pemberdayaan, masyarakat, pesisir.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan E-KTP di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil)”

Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si. Pembimbing I dan Dr. Abdul Mahsyar, M.Si. Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah senantiasa memberikan pengajaran dan didikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proses belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 08 Oktober 2018

**Aswad Amir**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian .....	10
B. Tinjauan Teoretis .....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Pengertian Pemberdayaan.....	19
3. Program dan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
4. Definisi Masyarakat Pesisir.....	26
5. Program Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat..	27
C. Kerangka Pikir .....	35
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Unit Analisis dan Penentuan Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43



G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi Desa Balombang.....	48
B. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene .....	53
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene .....	62
D. Pembahasan.....	65
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	76



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua Provinsi di Indonesia memiliki perairan laut. Artinya, pasti ada daerah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Sayangnya, dengan potensi laut yang besar itu, tidak ada sistem pengelolaan yang terpadu berkenaan dengan sumberdaya laut dan sumberdaya masyarakat pesisir di Indonesia. Sistem yang ada hanya sistem pengelolaan sentralistik yang hanya memungkinkan penguasaan sumberdaya laut di Indonesia oleh nelayan maupun masyarakat pesisir dengan kekuatan modal yang besar. Pada awalnya, pengelolaan semacam ini dimulai sejak masa kolonial belanda setelah itu diikuti oleh rezim Orde Baru dan Orde Lama (Satria. 2002: 3).

Pembangunan daerah pesisir kelautan selama tiga dasawarsa terakhir selalu diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Sehingga secara ekonomis

dan politis sangat logis jika bidang kelautan dan masyarakat pesisir dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional (Kusumastanto. 2002:1).

Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantau pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

Bersamaan dengan arus reformasi yang sedang berjalan, pemikiran ke arah ekonomi daerah menjadi perhatian baru dalam pengelolaan sumber daya masyarakat pesisir dan kelautan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, justru dijadikan alat untuk membentuk rezim baru, tidak terkecuali dalam pengelolaan sumber daya masyarakat pesisir dan kelautan.

Sekarang ini pembangunan daerah pesisir mulai menjadi fokus utama akibat terjadinya ketertinggalan pada masyarakat pesisir, karena selain terbatasnya dalam mengakses sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat pesisir semakin tertinggal. Untuk itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat pesisir. Hal ini ditempuh dengan memberikan penguatan baik yang bersifat ekonomi kelembagaan maupun yang sifatnya sosial-budaya yang muaranya kepada peningkatan kesejahteraan.

Kemiskinan masyarakat pesisir berakar pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif. Keterbatasan akses permodalan ditandai dengan realisasi modal melalui investasi pemerintah dan swasta selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) yang hanya 0,02 % dari keseluruhan modal pembangunan. Konsekuensinya, masyarakat daerah pesisir terutama nelayan, kebutuhan permodalan dipenuhi oleh para tengkulak, toke, atau ponggawa, yang kenyataannya tidak banyak menolong untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, malah cenderung menjeratnya dalam lilitan utang yang tidak pernah bisa dilunasi. Demikian pula kultur kewirausahaan mereka masih bercorak manajemen keluarga dengan orientasi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*subsistence*).

Lingkungan laut (termasuk lingkungan pesisir) secara geografis sangat berbeda dengan daratan. Perbedaan letak geografis tersebut tentu saja berdampak kepada perbedaan upaya atau sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang mendiaminya, maka dalam hal ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, melalui pengembangan kultur kewirausahaan (*entrepreneurship*), mengadakan penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkesinambungan maka dibentuklah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikhususkan untuk masyarakat pesisir (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005: 1).

Program ini berjalan dengan dana yang berasal dari APBN dan dana kompensasi BBM serta dukungan penuh dari Departemen Kelautan dan Perikanan kini program PEMP telah dilaksanakan di 247 kabupaten/kota dengan jumlah LEPP-M3 kurang lebih 300 buah. Dalam mengakses permodalan, melalui program PEMP pada tahun 2003 dikucurkan dana sebesar Rp 120 milyar mengakomodir 126 kabupaten/kota, tahun 2002 dikucurkan dana Rp.90 milyar mengakomodir 90 kabupaten/kota. Tahun 2001 dikucurkan dana sebesar Rp 105.8 milyar untuk 125 kabupaten/kota. Untuk tahun 2004 ini dialokasikan dana sebesar Rp 140 milyar untuk 160 Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya ditempuh melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Swamitra Mina kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Bank Bukopin (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006: 1).

Pada awalnya program PEMP diadakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui perguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPPM3) yang sejatinya dibentuk sebagai cikal bakal usaha bersama milik masyarakat pesisir (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006: 2).

Pembentukan kelembagaan dan sistem bani ini semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan prinsip pemberdayaan, yaitu *helping the poor to help themselves*.

Program ini diharapkan dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan swasembada, dalam banyak hal didahului oleh “tahap tinggal landas” yang disebutkan oleh Rostow. Pembaharuan organisasional dan struktural ini dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat karena dibentuknya lembaga-lembaga yang memberikan kemungkinan permodalan usaha penanggulangan berbagai macam kemacetan, terutama dalam bidang pembentukan modal.

Pemanfaatan dari pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir ini melalui unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) USP - Swamitra Mina oleh masyarakat pesisir merupakan salah satu jenis bantuan tidak langsung yang diberikan Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi masalah permodalan dan sosial kepada masyarakat pesisir.

Dengan adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) ini diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitatif berupa peningkatan budaya berkelompok, kesadaran menjaga kualitas lingkungan dan sumberdaya ikan berupa kesepakatan melarang kegiatan penangkapan yang bersifat merusak (penggunaan potasium dan bom), peningkatan budaya menabung dan berkurangnya penyakit sosial (seperti mabuk, judi dan sebagainya).

Istilah pemberdayaan telah menjadi perhatian yang mendalam dalam Kesejahteraan Sosial khususnya masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (*disadvantage groups*). Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah pembaharuan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kenyataan ini yang menjadikan pekerjaan sosial seharusnya berperan serta untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan dasar dalam pemberdayaan masyarakat agar masyarakat yang lemah dan kurang beruntung tersebut dapat menjadi individu yang lebih baik. Karena itu juga penulis sebagai mahasiswa Program Pasca sarjana melihat ini menjadi suatu masalah yang harus diteliti. Mengingat bahwa masyarakat pesisir juga warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani hidup di Bumi Indonesia tercinta ini.

Di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sudah berjalan beberapa tahun terakhir, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat pesisir terutama para nelayan di Kabupaten Mejene khususnya Desa Balombong, kecamatan Pamboang, yang belum dapat membangun ataupun mengembangkan usahanya. Sebagian besar masyarakat Balombong belum dapat memenuhi biaya hidup yang memadai dan kegagalan dalam menguasai potensi produktif yang tersedia. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu daerah pesisir tersebut.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pengamatan penulis pada lokasi penelitian dan sesuai dengan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh dengan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan disiplin ilmu administrasi publik sehingga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan alternatif pemikiran serta bahan



bahan referensi pembandingan (*benchmark*) bagi semua pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi bahan untuk memberikan gambaran tentang studi implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah kabupaten majene (eksekutif) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan kajian akademik, perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene.



## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Hasil Penelitian**

Penelitian tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut pandang ilmu administrasi publik, ilmu politik, maupun rumpun ilmu sosial politik yang lain. Oleh karena itu, untuk menggali penelitian ini, ada beberapa kajian

pustaka yang relevan dengan tema penelitian peneliti di atas. Hal ini penting untuk mengambil *entry point* penelitian, *positioning* penelitian serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Rini Adiwibowo (2015) yang berjudul: Implementasi kebijakan pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provnsi Jawa Barat). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam megimplementasikan kebijakan, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga.

2. Sefryan Ardi Saputra (2014) yang berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang telah siap melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan

Mangunharjo. Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sudah dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah (1) kemampuan implementor yang baik dalam menyampaikan informasi, (2) kejelasan informasi yang diperoleh masyarakat, (3) komitmen implementor yang baik dalam melaksanakan program, (4) pemanfaatan wewenang yang dimiliki implemtor secara maksimal.

3. lin Indarti dan Dwiyadi Surya Wardana (2013) yang berjudul: Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah diperolehnya manfaat oleh nelayan jika melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain: 1. Membangun economies of scale dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input. 2. Memperoleh external economies yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka. 3. Memperoleh manfaat-manfaat non-ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis dan relevan untuk penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan daya kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya.

## B. Tinjauan Teoretis

### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan dipandang sebagai sebuah studi yang krusial terutama untuk *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi (Edward, 1980).

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Jones (1996:166) memberikan definisi implementasi kebijakan (*policy implementation*) sebagai sebuah penerapan yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Selanjutnya Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2012 :8) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Selain itu, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan public penjelas atau sering diistilahkan sebagai Peraturan Pelaksanaan (Nugroho, 2014:494).

Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan tahapan atau serangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan (Nugroho, 2006:119).

Implementasi menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, menjelaskan bahwa:

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975:447).

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas Van Meter dan Vanhorn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan;
2. Sumber-sumber kebijakan;
3. Karakteristik badan-badan pelaksana;
4. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik;
5. Sikap para pelaksana; dan
6. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

(Meter dan Vanhorn, 1975:462-478).

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja

implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mengemukakan implementasi sebagai: "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya" (Mazmanian dan Paul Sabatier, 1983:61).

Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi adalah sebuah program atau sebuah kebijakan yang kelihatannya bagus di atas kertas namun lebih sulit merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang terdengar menyejukkan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarkannya. Implementasi kebijakan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang.

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact of Implementation*. Dalam penekatan yang diteorikan oleh George C. Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi,
2. Sumber daya,
3. Disposisi, dan



#### 4. Struktur birokrasi

(Edward III, 1980:16-20)

Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

*Pertama*, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan, adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

*Kedua*, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan



dengan baik. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

*Ketiga*, variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

*Keempat*, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

## **2. Pengertian Pemberdayaan**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau

keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005: 57). Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat tergantung pada hal:

- a. Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak akan mungkin terjadi dalam keadaan apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal seperti persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi

ekstenial seperti ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Suharto. 2005: 58).

Untuk mengetahui fokus pemberdayaan secara operasional perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan orang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. Misalnya dalam hal ini ekonomi masyarakat pesisir.

Schuler, Hashemi, dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Suharto. 2005: 63) sebagai berikut:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika ia mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako. kebutuhan dirinya sendiri seperti rokok, minyak rambut dan lain-lain. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih lagi jika ia menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier, seperti televisi, lemari, baju dan lain-lain. Seperti hal indikator di atas, poin tinggi kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa

meminta izin kepada pasangannya, terlebih jika ia menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, seperti mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama anggota keluarga mengenai keputusan-keputusan keluarga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Keterlibatan dalam kampanye ataupun protes-protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif maupun tabungan.

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan memui tiga tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu (Suharto, 2005: 66):

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terliadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilau dan sikap-sikap klien dalam memecahkan permasalahannya.

Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran pembaharuan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi- situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### 3. Program dan Pemberdayaan Masyarakat

Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang dirangkaikan sehingga membentuk suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberdayaan adalah proses pembangunan yang mencakup segala aspek fisik dan mental.

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses membangun segala aspek masyarakat, mulai dari skill, taraf hidup, pendapatan, kesejahteraan, pendidikan, sampai kepada kesehatan baik masyarakat secara kelompok, lembaga maupun individu.

Pemberdayaan organisasi atau empowerment adalah proses membangun anggota, dedikasi, dan komitmen yang tinggi sehingga organisasi itu bisa menjadi sangat efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan mutu yang tinggi. Pemberdayaan juga dapat meliputi:

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan *bergainning position* yang diperintah terhadap pemerintah. *Bergainning* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang

merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain. Utomo menyatakan bahwa birokrasi yang berdaya dan tangguh adalah yang memiliki "quality of work life" yang tinggi dan berorientasi kepada; (1) *participation in decision making*, (2) *career development program*, (3) *leadership style*, (4) *the degrees of stress experienced by employees*, dan (5) *the culture of the organisation*.

- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir atau *Coastal Community Development Project* (CCDP) yang merupakan kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan *International Fund Agricultural Development* (CCDP) di Kabupaten Majene mulai

membuahkan hasil. Salah satunya adalah menggerakkan masyarakat untuk memproduksi makanan olahan hasil laut.

Menurut Ketua Kelompok Harapan Wanita Desa, Supiati, dari program ini, masyarakat, terutama kaum wanita diberikan bantuan berupa pelatihan untuk mengelola hasil laut menjadi makanan olahan. Selain itu, program ini menyediakan mesin pengolahan dan juga menyediakan tempat sebagai rumah produksi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Khususnya Desa Balombong

#### **4. Definisi Masyarakat Pesisir**

Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu (Mayo, dalam Suharto, 2005: 39):

- a. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama.
- b. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Menurut Pedoman umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke wilayah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimenasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.



Ditinjau dari garis pantai, suatu wilayah pesisir memiliki dua kategori batas; yaitu yang sejajar dengan garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus dengan garis pantai (*crossshore*).

Definisi di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat garis batas yang nyata wilayah pesisir. Batas tersebut hanyalah garis Khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di tempat yang landai, garis ini dapat berada jauh dari garis pantai dan sebaliknya untuk wilayah yang tejal.

Maka definisi masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah antara pertemuan laut dengan darat, baik kering maupun terendam yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan angin laut.

#### **5. Program Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat**

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya jumlah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir pantai. Nelayan sendiri menjadi sebuah fenomena yang selalu menjadi bahan diskusi publik akan permasalahan-permasalahannya, karena isu-isu seperti nelayan yang masuk ke dalam kategori masyarakat yang marjinal, miskin, dan menjadi sasaran eksploitasi dalam kehidupan mereka oleh pemilik modal dan pemerintah Indonesia sendiri secara ekonomi maupun politik. Isu-isu tersebut kemudian menyebabkan label kemiskinan melekat erat dengan para nelayan di Indonesia.



Label tersebut memang disematkan kepada mereka karena kondisi seperti pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, penguasa yang datang, serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-nelayan.

Banyak sekali kasus-kasus nelayan miskin di wilayah Indonesia, bahkan hingga diangkat dalam berbagai tulisan dan penelitian. Salah satu contoh penelitian yang pernah dilakukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto (1984), penelitian tersebut menganalisis perekonomian masyarakat nelayan miskin di Jepara. Menurut Mubyarto dkk, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur yaitu nelayan terbagi atas kelompok kaya dan kaya sekali di satu pihak, miskin dan miskin sekali di satu pihak. Penelitian ini menunjukkan adanya dominasi/eksploitasi dari nelayan kaya terhadap nelayan miskin. Hampir sama dengan penelitian di atas selanjutnya Mubyarto dan Sutrisno (1988) juga melihat kemiskinan nelayan di Kepulauan Riau. Menurut Mubyarto dkk, kemiskinan nelayan lebih banyak disebabkan oleh adanya tekanan struktur, yaitu nelayan kaya/penguasa yang menekan nelayan miskin.

Hasil-hasil penelitian seperti yang telah disebutkan beberapa di atas, menunjukkan adanya ketidakberdayaan para nelayan miskin terhadap kondisi sosioal, ekonomi, dan politik, yang berlaku terhadap mereka di tiap-tiap daerahnya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan kemiskinan semakin menjadi-jadi dan menekan mereka untuk tetap hidup di dalam garis kemiskinan. Diperlukan sebuah upaya dari

pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan dukungan kepada para nelayan miskin ini, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan kemudian menjadi mandiri secara ekonomi karena kemapanan mereka.

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, terutama para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikembangkan secara nasional. Program PEMP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Dalam position paper pemberdayaan masyarakat pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan disebutkan, bahwa berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir (nelayan) dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif.

Pembangunan yang komprehensif, yakni pembangunan dengan memiliki ciri-ciri: (1) berbasis lokal (melibatkan sumberdaya lokal sehingga return to local resource dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Sumberdaya lokal yang patut digunakan adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (menitikberatkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya peningkatan produksi), (3) berbasis kemitraan (kemitraan yang mutualistis antara orang lokal atau orang miskin dengan orang yang lebih mampu, untuk membuka akses terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, manajemen yang lebih baik atau profesional, serta pergaulan bisnis

yang lebih luas, (4) secara holistik atau multi aspek (pembangunan mencapai semua aspek, setiap sumberdaya lokal patut diketahui dan didayagunakan), dan (5) berkelanjutan (keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri, mencakup aspek ekonomi dan sosial) (DKP 2002).

Program PEMP yang dibentuk oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang positif bagi para nelayan miskin di daerah pesisir. Beberapa aspek yang berubah setelah adanya pemberlakuan program ini antara lain seperti aspek pendapatan para nelayan. Contoh kasusnya adalah aspek pendapatan para nelayan di daerah Halmahera Utara. Sebelum diberlakukannya strategi pemberdayaan dalam bentuk PEMP ini, para nelayan memperoleh pendapatan yang rendah dikarenakan pedagang ikan lebih memiliki nilai tawar yang tinggi dibanding nelayan dalam menentukan harga ikan hasil tangkapan. Ketergantungan nelayan terhadap para pedagang ikan mengakibatkan kesulitan bagi mereka, bahkan bisa disebut sebagai bentuk patron-client diantara nelayan dan pedagang ikan. Maka setelah PEMP berjalan, pendapatan nelayan mengalami peningkatan yang sangat signifikan antara 100-288%.

Tidak hanya melalui PEMP, pemberdayaan masyarakat pesisir terutama para nelayan miskin juga bisa dilakukan dengan bentuk-bentuk program lainnya yang berasal dari pemerintah ataupun dari komunitas nelayan itu sendiri. Beberapa aspek yang bisa diperhatikan dan dijadikan prioritas dalam perencanaan dan formulasi strategi pemberdayaan nelayan miskin antara lain seperti:

a. Pengembangan akses permodalan.

Strategi ini sangat penting karena pada dasarnya, pemasalahan utama yang selalu dirasakan menjadi factor utama penghambat dalam menaikkan taraf ekonomi para nelayan miskin adalah sulitnya memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Pemerintah bisa mengalokasikan dana yang lebih besar untuk memberikan modal kepada para nelayan, dikarenakan masih tingginya ketidakinginan bank di Indonesia untuk menyediakan modal bagi usaha perikanan para nelayan.

b. Pengembangan teknologi dan skala usaha perikanan.

Teknologi yang digunakan nelayan pada umumnya masihlah teknoloogi yang sederhana. Penggunaan teknologi yang masih sederhana ini kemudian berdampak pada rendahnya pendapatan mereka. Diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan pendapatan lewat perbaikan teknologi dan penggunaan teknologi yang lebih modern. Bilamana telah diberlakukan penggunaan teknologi yang lebih modern dan efektif, pemberdayaan tersebut harus terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan karekteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka.

c. Pengembangan akses pemasaran.

Pasar adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Tidak adanya pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala utama sebuah usaha apabila tidak berkembang. Oleh karenanya, pemerintah harus membuka dna memberikan akses yang lebih luas

lagi dalam pemasaran hasil tangkapan para nelayan miskin. Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran merupakan salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah, sehingga para nelayan miskin bisa bersaing dengan para nelayan kaya dan pemilik modal lainnya.

d. Penguatan kelembagaan para nelayan dan masyarakat pesisir.

Penguatan kelembagaan di kalangan masyarakat nelayan dapat membangun aksi solidaritas sosial dan kolektifitas masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang meninjau kebutuhan mereka. Melalui kelembagaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar masyarakat pesisir secara sosial dan ekonomi, serta menadi sebuah pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri. Peran pemerintah pusat dan daerah bisa diposisikan dalam kegiatan-kegiatan manajerial dalam memberikan wawasan, pengetahuan dan keterampilan, serta pendidikan mengenai manajemen usaha perikanan. Harapannya lewat kelembagaan yang kemudian terbentuk adalah mendorong modal sosial para nelayan sehingga lebih memiliki kekuatan secara sosial dan ekonomi yang mandiri. Pembinaan dan pelatihan diperlukan sebagai peran penting pemerintah untuk menciptakan masyarakat nelayan yang mandiri pada akhirnya.

e. Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan diakomodasi dalam manajemen perikanan partisipatori.

Manajemen ini dapat berupa manajemen berbasis masyarakat yang menurut Pomeroy and Williams (1999) sebagai suatu elemen sentral dari ko-manajemen. Manajemen berbasis masyarakat berfokus pada masyarakat, sedangkan ko-manajemen merupakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat serta pengguna sumberdaya lainnya. Pengelolaan berbasis masyarakat akan lebih optimal direalisasikan dengan pendekatan konsep *co-management*. *Co-management* adalah konsep manajemen pengelolaan bersama, artinya berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) setuju saling berbagi peran dalam pengelolaan, hak dan tanggung jawab, atas suatu kawasan atau sumberdaya alam yang dimaksud. Dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil dan merata (Nikijuluw 2002).

f. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan.

Sarana dan prasarana merupakan factor penting dalam menunjang usaha perikanan para nelayan miskin. Saran dan prasarana merupakan sebuah urat nadi dari berbagai macam kegiatan dan usaha. Minimnya saran dan prasarana yang dimiliki oleh para nelayan miskin di daerah pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas nelayan untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan saran dan prasarana penunjang bagi nelayan.

### C. Kerangka Pikir

Kemiskinan dan kurangnya akses untuk permodalan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara sehingga terjadi tingkat produktifitas yang rendah dan menyebabkan pendapatan yang rendah pula lalu tabunganya juga rendah investasi rendah dan tingkat pembentukan modal kerja rendah pula (Jhingan,1999:337)

Naik turunnya harga bahan bakar minyak sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir yang mengalami ketinggalan pembangunan selama ini selain terbatasnya permodalan, lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial ekonomi masyarakat di tingkat desa juga menjadi penyebab masyarakat pesisir semakin tertinggal.

Untuk mengatasi keadaan-keadaan seperti di atas, maka Pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan membuat sejumlah program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu dalam jangka panjang Program itu diarahkan kepada:

1. Peningkatan kemandirian masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, penguatan modal dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Peningkatan kemampuan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan sesuai dengan kaidah kelestarian lingkungan.



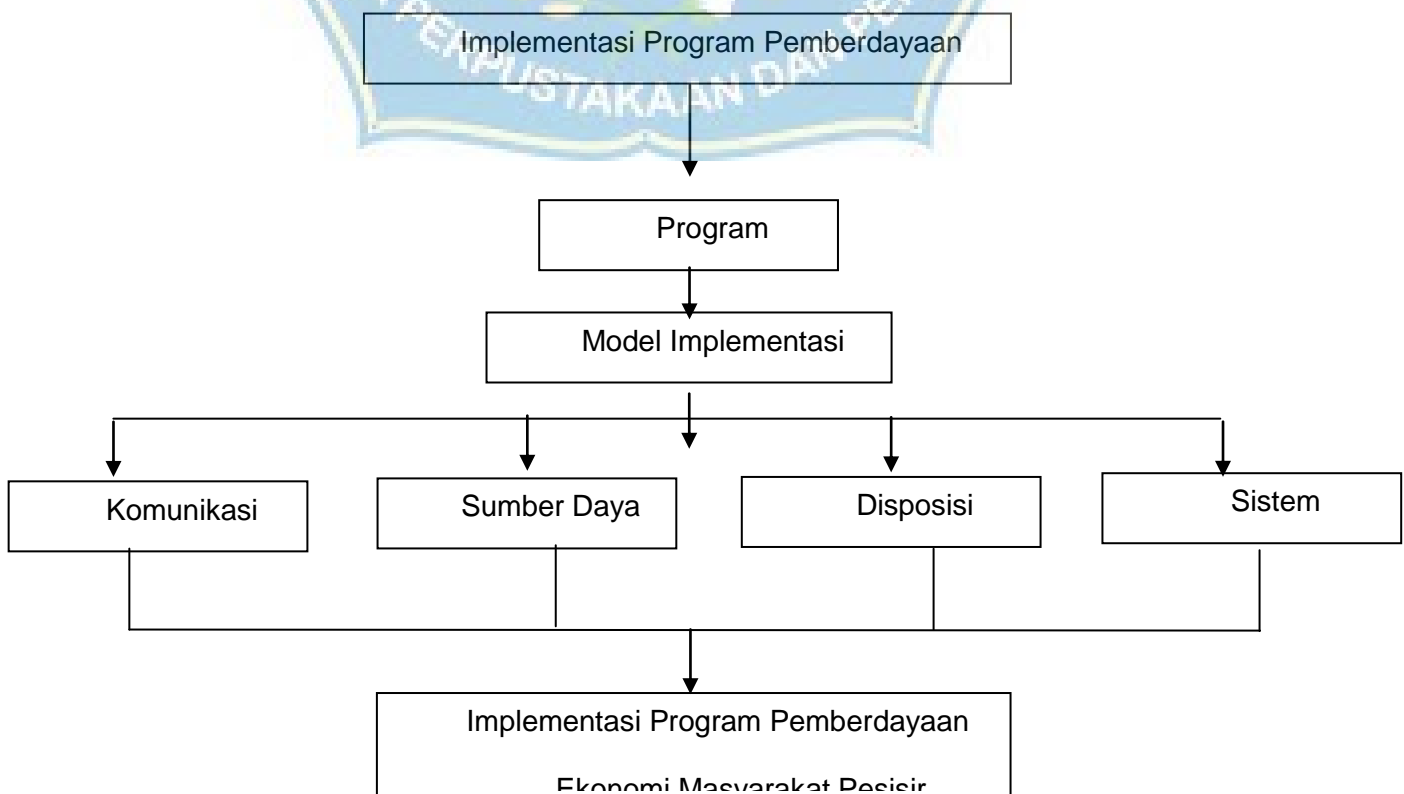
2. Pengembangan kemitraan masyarakat pesisir dengan lembaga swasta dan pemerintah.

Pelaksanaan Program ini dijalankan melalui Bumdes yang merupakan salah satu program pemerintah desa untuk mengatasi masalah permodalan dan sosial kepada masyarakat pesisir.

Sebagian masyarakat pesisir mengalami keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga dengan keberadaan Bumdes yang dikhususkan untuk masyarakat diharapkan agar meringankan beban mereka.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir mempunyai tujuan utama yakni memberikan akses dan kemudahan modal untuk masyarakat sesuai dengan model implemetasi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Bagan berikut menunjukkan kerangka pemikiran secara sistematis yaitu:

**Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir**





#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

- 1.** Implementasi program pemberdayaan adalah implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- 2.** Komunikasi adalah saah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- 3.** Sumberdaya adalah saah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan seperti sumberdaya keuangan, ketersediaan fasilitas dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- 4.** Disposisi adalah saah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan implementasi program yakni sikap dari pelaksana kebijakan yaitu BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- 5.** Struktur birokrasi adalah saah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam hal struktur aparatur pemerintah serta kepengurusan BUMDes di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Sugiyono, 2014).

Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berupa pengujian intensif terhadap suatu entitas tunggal yang dilengkapi dengan sumber dan bukti dari objek maupun subjek yang diamati serta terbatas pada ruang dan waktu. Penelitian jenis ini biasanya terkait dengan instansi, lembaga, kelompok, maupun organisasi di mana penelitian itu dilaksanakan.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan judul proposal penelitian ini, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten

Majene Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah mengimplementasikan  
Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama periode waktu satu  
bulan setelah seminar proposal penelitian.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumentasi mengenai proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut, seperti observasi keadaan geografis dan demografis Kabupaten Majene secara umum dan keadaan geografis dan demografis Desa Balombong Kecamatan Pamboang, serta wawancara dengan 5 (sembilan) informan yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, dan masyarakat.
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang ada hubungannya dengan proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene seperti data-data statistic, Majene dalam Angka, dan lain-lain.

#### **D. Unit Analisis dan Penentuan Informan**

Unit analisis dalam penelitian ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Selain itu penentuan informan bersifat heterogen untuk menjaga dan mengantisipasi netralnya jawaban informan. Adapun informan penelitian berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Majene | : 3 orang  |
| 2. Pemerintah Desa Balombong                | : 3 orang  |
| 3. BUMDes                                   | : 2 orang  |
| 4. Masyarakat Pesisir Desa Balombong        | : 5 orang  |
| Jumlah                                      | : 11 orang |

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Teknik ini penulis mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang oleh penulis dirangkai dalam sebuah kata dan kalimat yang ilmiah (*scientific word and sentences*) sesuai dengan fokus penelitian dan menangkap serta mencerna makna intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh dalam rangka mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh dan sistematis tentang

implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang kabupaten Majene kemudian dilakukan penelitian.

## 2. Wawancara

Teknik ini dimaksudkan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang lebih lengkap serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang berkaitan dengan erat dengan penelitian ini yaitu tentang implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

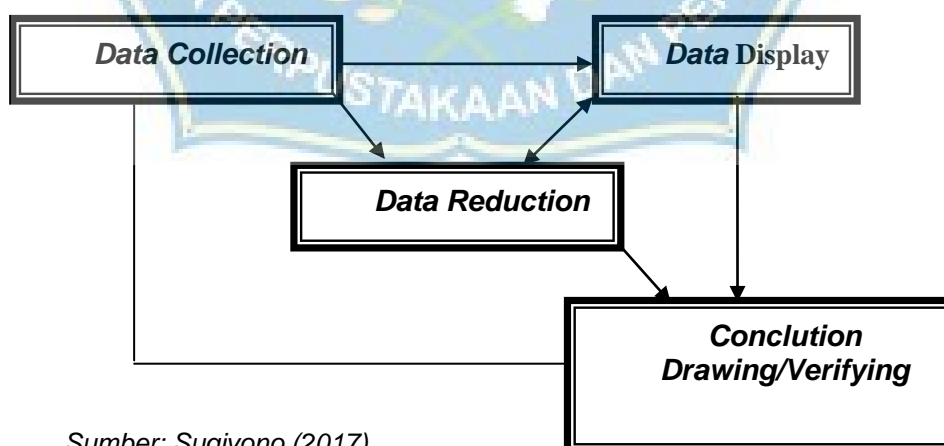
## 3. Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, media *online*, surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yg akan diteliti.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

**Gambar 3.1. Teknik Analisis Data oleh Miles dan Huberman**



Sumber: Sugiyono (2017)

## G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

#### 1. Perpanjangan masa pengamatan

Peneliti melakukan perpanjangan masa pengamatan karena data yang dikumpulkan dianggap belum cukup maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan, dan wawancara kepada informan, baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan, seperti peraturan daerah, peraturan bupati , dan lain-lain.

#### 2. Teknik meningkatkan ketekunan

Data yang diperoleh peneliti di lokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan secara cermat apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

#### 3. Triangulasi

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data triangulasi



diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu (Sugiyono, 2017) :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi,

atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. Melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dengan informan penelitian dengan melakukan observasi di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data. Triangulasi waktu dilakukan kepada informan penelitian saat melakukan proses wawancara,

yakni waktu yang diperkirakan akan memberikan jawaban yang netral.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Desa Balombang**

##### **1. Sejarah**

Balombang adalah sebuah kampung yang dihuni oleh sekelompok manusia sejak dahulu, sebelum zaman penjajahan Belanda atau kampung *simemangan* dari nenek moyang yang turun temurun sampai sekarang. Desa Balombang yang mana sebelum berdiri atau mekar menjadi satu Desa merupakan satu kesatuan dari Kelurahan Sirindu yang meliputi Lingkungan Pesuloang, Lingkungan Leba, Lingkungan Balombang Selatan, Lingkungan Balombang Utara, dan Lingkungan Ulu Balombang, Lingkungan Parappe, Lingkungan Salewang, Lingkungan Sirindu, Lingkungan Udzung, Lingkungan Ambawe yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan Sirindu Muh.Yassin Djamil, S.Sos, pada tahun 2010.

Masyarakat Balombang menginginkan mekar sejak dulu karena dilihat dari kondisi penduduk yang memenuhi persyaratan jadi Desa atau memungkinkan untuk berdiri sendiri. Akan tetapi, dengan menjadi Desa bukanlah hal yang mudah/gampang dan perlu ada perjuangan panjang masyarakat khususnya masyarakat Balombang yang dimonitori kalangan yang mempunyai peran yang besar didalamnya dan didukung oleh Wacana program pemerintah yang menginginkan pelayanan Prima dan percepatan

pengembangan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah pantai dan pegunungan yang masih sangat terisolasi dari perkembangan Kewilayahan dan kemasyarakatan.

Dengan adanya wacana Pemerintah maka diusulkanlah Balombong jadi Desa. Dengan beberapa tahapan yang dilalui masyarakat, maka dihadirkanlah Komisi I DPRD Kab. Majene dalam hal ini membicarakan pemekaran tersebut. Katanya masyarakat menuai beberapa persoalan dalam pembentukan Desa balombong, awalnya balombong dan pesuloang akan gabung jadi Desa karena syarat untuk jadi desa tidak bisa kalau Pesuloang tidak gabung. Setelah itu, timbul suatu pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk mengubah era baru dimana nama sebuah desa akan dinamakan? Maka disitulah persoalan yang mendasar sehingga banyak pendapat yang menginginkan nama Balombong diganti dan tidak. Dengan banyaknya pendapat. Maka dirapatkan kembali diruang peretemuan kantor camat pamboang bersama Komisi I DPRD Kab. Majene, Camat Pamboang, Lurah Sirindu, dan tokoh masyarakat diputuskanlah yaitu Desa Balombong dan Desa Pesuloang masing-masing jadi Desa sendiri. Dengan Melihat dari kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk dan yang lainnya sebagai syarat untuk berdiri satu buah Desa, maka atas kesepakatan dan prakarsa masyarakat serta pemerintah, sehingga lahirlah usulan permohonan pemekaran wilayah Kelurahan No

140/188/X/2012 tentang pembentukan/pemekaran Kelurahan/Desa. kemudian dengan dasar itu lahir peraturan daerah (perda) Kab. Majene Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa 8 Kecamatan Pamboang di Kab. Majene secara definitif dan Perda Nomor : 2 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Akhirnya Kelurahan Sirindu mekar menjadi tiga yakni Kelurahan Sirindu, Desa Balombong dan Desa Pesuloang. Pada tahun 2011 untuk pertama kalinya diadakan Pemilihan Kepala Desa, Pak Napsir terpilih dan meraih suara terbanyak dari lima calon dan pada tahun 2017 telah diadakan kembali pemilihan Kepala Desa tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 dan sekali lagi Pak Napsir terpilih kembali untuk menahkodai Desa Balombong untuk periode 2017 – 2023 dengan perolehan suara terbanyak dari ke 3 calon Kepala Desa Balombong.

Desa Balombong terdiri dari 3 (Tiga) Dusun hingga saat ini, yakni :

1. Dusun Balombong Selatan,
2. Dusun Balombong Utara dan
3. Dusun Ulu Balombong.

Balombong didiami 380 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.465 jiwa, dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Laki-Laki	735	50,99 %
2	Perempuan	730	49,01 %
<b>Total</b>		<b>1.465</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Profil Desa Balombang 2018

**Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat**

No	Jumlah KK	Persentase
1	269	80%
2	75	20%
<b>351</b>		<b>100 %</b>

Sumber Data : Profil Desa Balombang 2018

**Tabel 4.3 Mata Pencaharian Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1	Petani	109	Orang
2	Nelayan	57	Orang
3	Peternak	110	Orang
4	PNS	29	Orang
7	Tukang kayu	31	Orang
8	Tukang batu	7	Orang
9	Tukang ojek	1	Orang
10	Supir mobil	9	Orang

Sumber Data : Profil Desa Balombang 2018



## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis, Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mempunyai luas wilayah 3,32 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dan 8 (delapan) Rukun Tetangga (RT). Secara umum Desa Balombong berada pada 0-300 m dari permukaan laut suhu rata-rata 28-30<sup>0</sup> C.

Selain itu, jarak antara Desa Balombong dengan Ibukota Kecamatanyaitu 5 Km, sedangkan jarak Desa Balombong dengan Ibukota Kabupaten Majene 20 Km, serta jarak ibukota Desa dengan ibukota Provinsi Sulawesi Barat yaitu 120 Km.

Adapun batas-batas wilayah Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pesuloang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sirindu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Adolang dan Desa Banua Adolang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

## 3. Keadaan Ekonomi

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat Desa Balombong belumlah terlalu maju. Hal ini masih terlihat bahwa tingkat penduduk miskin yang masih cukup banyak, sebagaimana kebanyakan Desa-Desa di negeri ini hanya sektor pertanian perkebunan dan nelayan yang menjadi pekerjaan dominan digeluti

oleh mayoritas masyarakat Desa Balombang. Bekerja di bidang tersebut, belumlah dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya apalagi pada sektor-sektor lainnya.

#### **4. Keadaan Sosial**

Secara umum keadan sosial Desa Balombang cukup tinggi, hal ini terlihat dari sifat kegotongroyongan yang mampu menggerakkan masyarakat , masih terlihat kerja bakti sosial di tempat-tempat sarana ibadah seperti masjid dan sarana umum lainnya, jumlah sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit yang dekat dan sarana dan prasarana pendidikan juga sudah tersedia sebagai akses masyarakat dalam menempuh pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA dan bahkan perguruan tinggi juga bias dikatakan lokasinya dekat dengan Desa Balombang.

#### **B. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

Adapun hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian tesis ini dirangkum ke dalam beberapa indikator-indikator yang menjadi tolok ukur implementasi kebijakan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur / sistem birokrasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

## 1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan publik khususnya program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Majene yaitu dengan melakukan sosialisasi program tersebut kepada masyarakat, sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sebagai berikut :

“sosialisasi sudah kami lakukan, terkait program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong, dan masyarakat saya kira sudah memahami maksud dari program tersebut” (Wawancara “MA” 24 September 2018)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Desa Balombong berikut ini :

“Dinas Kelautan dan Perikanan sudah dua kali melakukan sosialisasi program ini, dan masyarakat pun menerima dan memahami program tersebut, dan semoga pelaksanaan program tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa ” (Wawancara “N” 26 September 2018)

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang dilakukan dengan strategi sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik, karena

pemerintah daerah intensif melakukan sosialisasi di beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene, termasuk di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Selain itu, sosialisasi juga intensif dilakukan tidak hanya kepada pemerintah Desa/Kelurahan, akan tetapi juga kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir di Desa Balombong. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Balombong sebagai berikut:

“pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sudah melakukan sosialisasi kepada kami, terkait program tersebut, program tersebut seperti bantuan mesin perahu / katinting, dan sosialisasi program tersebut berjalan lancar di Desa Balombong” (Wawancara “Y” 26 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa Balombong dilakukan dengan sosialisasi secara *top-down* terkait program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene termasuk Desa Balombong.

## **2. Sumber daya**

Sumber daya juga merupakan indikator yang penting dalam mengukur sejauhmana implementasi kebijakan / program pemberdayaan masyarakat pesisir tersebut berjalan dengan baik.

Sumber daya dapat dibagi ke dalam dua bentuk yakni sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Adapun hasil wawancara informan berikut ini memberikan gambaran terkait implementasi sumber daya dalam implementasi kebijakan tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

“terkait dengan sumber daya manusia, kami sebagai aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene, senantiasa memberikan pelayanan terbaik terkait bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene ” (Wawancara “MA” 24 September 2018)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai aparaturnya yang responsif dalam memberikan pelayanan terkait sosialisasi dan pelaksanaan program dengan baik. Selain itu, keterangan yang sama juga diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berikut ini:

“pelayanan dalam implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang keberlangsungan program masyarakat pesisir di Kabuapten Majene pada umjmnnya dan khususnya di Desa Balombong ” (Wawancara “S” 25 September 2018)

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sumber daya anggaran melalui

kegiatan pelatihan pengawasan ekosistem laut berbasis masyarakat pesisir, sosialisasi penyelamatan terumbu karang dan biota laut, workshop pelestarian ekosistem pesisir dan sosialisasi pelestarian daerah pesisir kelautan dan perikanan Kabupaten Majene. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sebagai berikut:

“pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk tahun 2018 yakni Rp 190.000.000,- untuk membiayai pelaksanaan sosialisasi penyelamatan terumbu karang dan biota laut, workshop pelestarian ekosistem pesisir dan sosialisasi pelestarian daerah pesisir kelautan dan perikanan Kabupaten Majene termasuk di Desa Balombong” (Wawancara “MA” 24 September 2018)

Selain itu, penjelasan berbeda diberikan oleh salah satu perwakilan masyarakat pesisir Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut :

“distribusi anggaran oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sudah dialokasi dan didistribusi dengan baik meskipun terkadang lambat proses pencairannya karena banyak administrasi pencairan yang perlu disiapkan oleh masyarakat” (Wawancara “AK” 27 September 2018)

Berdasarkan hasil wawanara tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa konsisten dalam mengimplemetasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene. Akan tetapi,terdapat beberapa kelemahan, karena setelah perubahan regulasi kebijakan

pemerintahan daerah, maka terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yakni kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Namun, secara umum terkait indikator sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah berjalan dengan baik.

### 3. Disposisi

Indikator selanjutnya adalah mengukur implementasi kebijakan / program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan melihat capaian indikator disposisi, yakni watak dari para implementor kebijakan, aparatur birokrasi, pemerintah desa dan masyarakat sebagai target dan sasaran program tersebut. Oleh karena itu, Adapun hasil wawancara dilakukan dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

“aparatur senantiasa memberikan pelayanan dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik, pemerintah menjamin insentif (upah) tambahan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dengan baik ”  
(Wawancara “MA” 24 September 2018)

Selain itu, hasil wawancara tersebut senada dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berikut ini :

“pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan program tersebut, saya kira tidak diragukan karena aparatur pemerintah daerah khususnya di Dinas



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sudah melalui proses sosialisasi, pendidikan dan pelatihan untuk menunjang pengetahuannya ketika turun ke lapangan ” (Wawancara “S” 25 September 2018)

Selain itu, hasil wawancara tersebut senada dengan keterangan yang diberikan oleh perwakilan masyarakat Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebagai berikut:

“pemerintah tidak memberikan pelayanan yang minimal, kadang kita mendapatkan pelayanan maksimal kadang tidak maksimal ” (Wawancara “AK” 27 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah melaksanakan indikator disposisi dengan baik yang ditandai dengan pemberian upah (insentif) bagi aparatur yang akan mengimplementasikan kebijakan / program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong. Selain itu, aparatur dibekali pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir karena sudah diberikan pendidikan, pelatihan sebelumnya sebelum berinteraksi dengan masyarakat pesisir di Desa Balombong.

#### 4. Sistem birokrasi

Sistem birokrasi juga menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan / program tersebut. Sistem dan struktur birokrasi harus mampu menjamin implementasi kebijakan / program tersebut berjalan dengan lancar, agar tujuan kebijakan dan program tersebut tepat target dan tepat sasaran. Oleh karena itu, wawancara dengan informan berikut ini memberikan gambaran bagaimana sistem dan struktur birokrasi tersebut dapat mengimplemetasikan kebijakan dan program tersebut. Adapun hasil wawancaranya dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sebagai berikut:

“sistem dan struktur birokrasi berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala seperti terjadinya restrukturisasi organisasi pemerintah daerah sehingga terjadi tumpah tindih dalam pengelolaan tugas pokok dan fungsi ” (Wawancara “S” 25 September 2018)

Hasil wawancara tersebut, sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berikut ini:

“dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, pihak pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak maksimal mengimplementasikan kewenangan karena ketidaktahuan tupoksi dan batas-batas kewenangannya” (Wawancara “MA” 24 September 2018)

Penjelasan tersebut juga dibenarkan oleh informan berikut ini yang memberikan kejelasan bahwa ada kendala dalam sistem / struktur birokrasi yang tidak berjalan beriringan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Balombong sebagai berikut:

“saya mengetahui ada masalah, ketika saya sebagai pemerintah desa, melakukan konsultasi ke Kabupaten meminta bantuan pemberdayaan masyarakat pesisir, akan tetapi pihak DKP kabupaten mengarahkan untuk ke DKP Provinsi, sehingga tidak memberikan kejelasan ini ranah kewenangannya provinsi atau kabupaten”  
(Wawancara “N” 26 September 2018)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa struktur dan sistem birokrasi secara umum masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan serta ada beberapa hambatan yang penulis temukan, terutama dalam bidang tumpang tindih kewenangan terkait urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene.

### **C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yakni faktor pendukung dan faktor yang menghambat proses implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai berikut:

#### **1. Faktor pendukung**

Berdasarkan hasil pengumpulan data di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang mensukseskan program implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Balombong sebagai berikut:

“salah satu hal yang mensukseskan program tersebut adalah adanya integrasi antara program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa” (Wawancara “N” 26 September 2018)

Selain itu, penjelasan tersebut senada dengan pandangan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene berikut ini :

“kesuksesan implementasi program juga karena program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah daerah selaras dengan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Balombang dengan pembagian mesin katinting”  
(Wawancara “MA” 26 September 2018)

Selain itu, penjelasan terkait keberhasilan proses implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir, juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat nelayan sebagai berikut :

“kami masyarakat nelayan diuntungkan dengan kegiatan pemberdayaan yang terpadu antara pemerintah desa yaitu pembagian mesin katinting dan program pemberdayaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten Majene” (Wawancara “AK” 27 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor yang mensukseskan implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Balombang adalah adanya keserasian antara kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Desa Balombang.

## **2. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, menunjukkan adapula beberapa hal yang menghambat proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap informan penelitian yakni Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sebagai berikut:

“salah satu hal yang menghambat proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong adalah adanya ketidakjelasan kewenangan antara pihak pemerintah provinsi dan pihak pemerintah kabupaten” (Wawancara “MA” 24 September 2018)

Selain itu, hasil wawancara tersebut sejalan dengan pandangan Kepala Desa Balombong sebagai berikut :

“adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene sehingga membingungkan kita sebagai pemerintah desa untuk mengurus administrasi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir” (Wawancara “N” 26 September 2018)

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, telah ditemukan bahwa ada hambatan yang ditemukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Akan tetapi, hambatan tersebut dapat diatasi dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi aktif antara masyarakat, pemerintah desa Balombong, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut dikemukakan oleh Sekretaris Desa Balombong sebagai berikut :

“sebagai perwakilan masyarakat nelayan, saya hanya intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi ” (Wawancara “Y” 26 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hambatan yang ditemukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah tumpang tindih (*overlapping*) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dengan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga tumpang tindihnya kewenangan tersebut melahirkan hambatan dalam implementasi program tersebut.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas bahwa proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene diukur berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Edward III 1980:16-20 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi.

##### **a. Komunikasi**

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa Balombong dilakukan dengan sosialisasi secara *top-down* terkait program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten



Majene. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Majene termasuk Desa Balombong, hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dijelaskan Menurut Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat keputusan (*decision maker*) udah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Sumber daya

Pemerintah daerah dan pemerintah desa konsisten dalam mengimplemetasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene. Akan tetapi,terdapat beberapa kelemahan, karena setelah perubahan regulasi kebijakan pemerintahan daerah, maka terjadi tumpang tindih

(*overlapping*) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yakni kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Namun, secara umum terkait indikator sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pandangan yang disampaikan menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

c. Disposisi

Pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah melaksanakan indikator disposisi dengan baik yang ditandai dengan pemberian upah (insentif) bagi aparatur yang akan mengimplementasikan kebijakan / program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong. Selain itu, aparatur dibekali pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir karena sudah diberikan pendidikan, pelatihan sebelumnya sebelum berinteraksi dengan masyarakat pesisir di Desa Balombong. Oleh karena itu, menurut Edward III bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu

kebijakan adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

d. Sistem Birokrasi

Struktur dan sistem birokrasi secara umum masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan serta ada beberapa hambatan yang penulis temukan, terutama dalam bidang tumpang tindih kewenangan terkait urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene. Hal tersebut kurang sejalan dengan pandangan menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan

tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumbernya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

### **a. Faktor Pendukung**

Salah satu faktor yang mensukseskan implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Balombang adalah adanya keserasian antara kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Desa Balombang. Faktor pendukung tersebut dapat mendorong keberhasilan dalam proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

### **b. Faktor Penghambat**

Hambatan yang ditemukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah tumpang tindih (*overlapping*) antara Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Majene dengan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga, tumpang tindihnya kewenangan tersebut melahirkan hambatan dalam implementasi program tersebut. Selain itu, hambatan yang ditemukan tersebut harus mampu diselesaikan oleh seluruh *stakeholders* dalam rangka meminimalisir berbagai kelemahan-kelemahan dalam proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **E. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa Balombong dilakukan dengan sosialisasi secara *top-down* terkait program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada seluruh Desa/Kelurahan di Kabupeten Majene termasuk Desa Balombong. Selain itu, pada sumber daya, pemerintah daerah dan pemerintah desa konsisten dalam mengimplemetasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Majene. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan, karena setelah perubahan regulasi kebijakan pemerintahan daerah, maka terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, yakni kewenangannya diberikan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Namun, secara umum terkait indikator sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sudah berjalan dengan baik, Sedangkan, pada aspek disposisi, pemerintah daerah dan pemerintah desa sudah melaksanakan indikator disposisi dengan baik yang ditandai dengan pemberian upah (insentif) bagi aparatur yang akan mengimplementasikan kebijakan / program

pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Balombong. Selain itu, aparat dibekali pengetahuan dan wawasan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir karena sudah diberikan pendidikan, pelatihan sebelumnya sebelum berinteraksi dengan masyarakat pesisir di Desa Balombong, dan terakhir adalah indikator sistem / struktur birokrasi, sistem birokrasi secara umum masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan serta ada beberapa hambatan yang penulis temukan, terutama dalam bidang tumpang tindih kewenangan terkait urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene.

2. Faktor yang mensukseskan implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Balombong adalah adanya keserasian antara kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Desa Balombong. Sedangkan, hambatan yang ditemukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene adalah tumpang tindih (*overlapping*) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dengan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi



Barat. Sehingga, tumpang tindihnya kewenangan tersebut melahirkan hambatan dalam implementasi program tersebut.

#### **F. Saran**

Berdasarkan simpulan sebagaimana dikemukakan di atas, maka saran penulis dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi publik pada umumnya dan khususnya dalam kajian kebijakan publik adalah sebagai berikut:

5. Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir harus senantiasa direalisasikan dengan baik dengan melihat indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) yakni melihat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sistem birokrasi. Apabila keempat indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mustahil kebijakan tersebut akan terealisasi sesuai target sasaran dengan baik.
6. Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu melakukan analisis implementasi kebijakan dan program sesuai dengan kajian teoretis dan praktis yang ada di daerah Kabupaten Majene.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wiboworini. 2015 *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir*. JIPSI.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali Lukman dkk 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pdf* Jakarta : Balai Pustaka.
- Budiarjo, Meriam 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Jakarta
- Climer Rodee, Carton, 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Rajawali.
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut .Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2005. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Dirjen Kelautan
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006. *Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : Dirjen Kelautan
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Faishal Zaini, Helmy A *Artikel/ pembangunan\_Pedesaan. Pdf Pembangunan Pedesaan” Pdf*, Diakses tanggal 25 Juli 2018.
- Gaffar, Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijaksanaan Publik (Publik Policy)*, Terjemahan Ricky Ismanto. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi,2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : LKIS.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. New York : HerperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process : A Conseptual Framework dalam Administration and Society 6*, 1975, London : Sage.
- Moelyarto, 1999. *Ilmu Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

- Saputra, Ardi. 2014. *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. JIPSI
- Sanit, Arbi. 2003. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satria, Arif. dkk. 2002 *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Cidesindo
- Schumacher. 1973. *Aspek Ekonomi dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siagian. Sondang P., *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990 *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : ZR Lestiasa
- Soeprapto, Riyadi H.R 2010, *The Capacity Building for Local Government toward Good Governance*, Work Bank.
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung PT. Refika Aditam
- Tahjan, H. 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : RTH.
- Wardana Dwiyantri 2013 *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan kelembagaan Wilayah*. Benefit



## RIWAYAT HIDUP



**Aswad Amir, S.IP., M.AP.** Lahir pada tanggal 08 Februari 1990, di Maneje, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan Anak tunggal, dari pasangan Drs. Amir dan Rosmawati.

Riwayat Pendidikan, penulis pertama kali masuk pendidikan Formal di SDN 7 Ulu Balombong Majene pada tahun 1995 dan tamat pada tahun 2001. melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Pamboang Majene masuk pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2004, selesai SMP penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pamboang Majene masuk tahun 2004 dan selesai tahun 2007.

Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2014 dengan *cumlaude* dengan gelar Sarjana Ilmu Politik (S. IP). Pada tahun 2016 melanjutkan ke program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Prodi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik dan selesai pada tahun 2019 setelah mempetahankan tesis dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Majene”

Selain aktif dalam dunia akademik, penulis juga aktif dalam berbagai pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan yang lain, juga aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus diantaranya :

1. Darul Arqam Dasar (LK 1) di PK IMM Fisip Unismuh Makassar tahun 2009
2. Darul Arqam Madya (LK 2) di PC IMM Bulukumba tahun 2011
3. Latihan Kepemimpinan Pemerintahan I (LKP 1) HIMJIP di Makassar tahun 2009

4. Latihan Kepemimpinan Pemerintahan II (LKP 2) di Malang tahun 2011
5. Training Kepemimpinan Dasar Komisariat Pamboang FKMM tahun 2010
6. Sekretaris Bidang Hikmah PK IMM Fisip Unismuh Makassar Periode 2010-2011
7. Ketua Bidang Organisasi PK IMM Fisip Unismuh Makassar Periode 2011-2012
8. Departemen Bidang Organisasi HMJ Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar Periode 2010-2011
9. Laskar Merah Putih Makassar
10. PC PM Ujung Pandang
11. Forum Komunikasi Mahasiswa Mandar

Selain itu pernah menjadi tenaga honorer di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2008-2010, dan magang di Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) tahun 2013.

